

STRATEGI PENINGKATAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Igo Saputra
NPP 32.0695

Asdaf Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Email: igosaputra@gmail.com

Pembimbing Skripsi: MGS. Ismail S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Digital Population Identity (IKD) is a strategic step by the government in digitizing population documents to support the digital transformation of public services. However, the achievement of IKD activation in Sanggau Regency, West Kalimantan, until the end of 2024 has only reached 2.04%, far below the national target of 30%. This condition reflects the gap between central policy and regional implementation, which is influenced by limited digital infrastructure, low technological literacy of the community, challenging geographical conditions, and suboptimal socialization and services. **Purpose:** This study aims to formulate a strategy for increasing IKD activation that is adaptive and applicable to the local context. **Method:** The study used a descriptive qualitative approach with observation techniques, in-depth interviews, and documentation. The analysis was carried out using the SWOT method to identify strengths, weaknesses, opportunities, and challenges in the implementation of IKD. **Results/Findings:** The findings obtained were strengths showing the availability of competent human resources, adequate digital infrastructure, sufficient budget, fast service times. Weaknesses were found to be Error system, Expensive transportation costs, Josh distance and Jemput bola was not optimal. Opportunities were found to be Policy Support, Community Participation, Collaboration with other agencies, Active social media. Threats were found to be Power outages, Threats of brokers, Community ability to understand IKD and Network constraints. SWOT analysis revealed opportunities such as high use of social media and potential for cross-agency cooperation. The strategies developed included strengthening human resources, utilization of digital media, collaboration between agencies, and development of inclusive and adaptive services. **Conclusion:** IKD activation in Sanggau Regency is still low due to a combination of structural, technical, and social factors.. **Conclusion:** The low IKD activation rate in Sanggau results from structural, technical, and social challenges.

Keywords: Digital Population Identity, Digital Transformation., Population Administration, SWOT, Sanggau Regency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendigitalisasi dokumen kependudukan

guna mendukung transformasi digital pelayanan publik. Namun, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, hingga akhir 2024 baru mencapai 2,04%, jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi daerah, yang dipengaruhi oleh terbatasnya infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi masyarakat, kondisi geografis yang menantang, serta sosialisasi dan layanan yang belum optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan aktivasi IKD yang adaptif dan aplikatif terhadap konteks lokal. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan metode SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam implementasi IKD. **Hasil/Temuan:** Temuan yang di dapatkan yaitu strength menunjukkan Ketersediaan SDM yang kompeten, Infrastruktur Digital memadai, Anggaran yang cukup, Waktu pelayanan yang cepat. Weakness didapatkan Sistem yang error, Biaya transportasi mahal, jarak yang jauh dan Jemput bola belum optimal. Opportunities didapatkan Dukungan Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, Kolaborasi dengan instansi lain, Media sosial yang aktif. Threats didapatkan Listrik padam, Ancaman calo, Kemampuan masyarakat memahami IKD dan Kendala jaringan. Analisis SWOT mengungkap peluang seperti tingginya penggunaan media sosial dan potensi kerja sama lintas instansi. Strategi yang disusun mencakup penguatan SDM, pemanfaatan media digital, kolaborasi antarinstansi, serta pengembangan layanan yang inklusif dan adaptif. **Kesimpulan:** Aktivasi IKD di Kabupaten Sanggau masih rendah akibat kombinasi faktor struktural, teknis, dan sosial. **Kata kunci:** Administrasi Kependudukan, Identitas Kependudukan Digital, Kabupaten Sanggau, SWOT.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Strategi merupakan elemen penting dalam menghadapi permasalahan dan mencapai tujuan, yang dalam konteks Indonesia telah mengalami perkembangan seiring waktu. Pada masa awal kemerdekaan, strategi difokuskan pada perjuangan fisik dan diplomasi, sementara pada era Orde Lama, strategi pemerintahan cenderung bersifat sentralistik dan membatasi demokrasi, yang berujung pada kebijakan tidak inklusif dan penolakan masyarakat. Memasuki era modern, Indonesia mulai menerapkan strategi yang lebih terstruktur dan adaptif, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Saat ini, strategi pemerintah sangat dipengaruhi oleh digitalisasi, yang dituangkan dalam kebijakan seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan modern.

Berangkat dari sudut pandang administrasi publik, tantangan utama yang dihadapi dalam abad 21 bagi pemerintah adalah membangun e-government yang empiris dan efektif dimana pemerintah mampu memberikan layanan publik melalui internet berupa inovasi (Mensah et al., 2020). Potensi kontribusi internet untuk meningkatkan interaktivitas, transparansi, dan keterbukaan entitas sektor publik serta untuk mempromosikan bentuk akuntabilitas baru (Bonsón et al., 2012).Kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam pelayanan publik di Indonesia. Salah satu inovasi digital yang

dikembangkan adalah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan akses terhadap layanan kependudukan (Ripa'i, 2018). Inovasi seperti ini dianggap sebagai wujud dari penerapan *smart governance*, yaitu penggunaan teknologi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat secara cepat dan responsif (Fitriana & Arif, 2024). Berdasarkan penelitian (Gatiningsih & Sutrisno, 2017), jumlah penduduk cenderung tetap disebabkan tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi. Namun untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman, masyarakat kini semakin menuntut kemudahan akses dan kecepatan layanan, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Pemerintah merespons tuntutan ini melalui program Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebagai bagian dari digitalisasi layanan kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik (Astuti, 2022). Digitalisasi ini menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan, serta menjawab tantangan demografis dan geografis yang kompleks (La Tarifu, 2020; Azizah *et al.*, 2022).

Berbagai daerah di Indonesia telah mengembangkan strategi aktivasi IKD dengan pendekatan berbeda, seperti pelayanan langsung di kantor dinas atau jemput bola ke masyarakat (Prasetyo *et al.*, 2022). Provinsi Jawa Timur, misalnya, berhasil mencapai tingkat aktivasi tertinggi di Indonesia melalui kolaborasi dengan komunitas lokal, menjadi contoh keberhasilan transformasi layanan digital berbasis komunitas (Prakoso, 2023). Namun demikian, secara nasional, realisasi program IKD masih jauh dari target 30% atau 60 juta pengguna, di mana pada Februari 2024 baru tercapai sekitar 4% atau 8,1 juta pengguna. Di Kalimantan Barat, kendala utama aktivasi IKD antara lain terbatasnya infrastruktur jaringan, minimnya literasi digital masyarakat, serta pelayanan terhadap penduduk non-permanen yang belum optimal (Mardewi *et al.*, 2021; Uang & Bataha, 2024).

Studi-studi sebelumnya menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sumber daya manusia yang kompeten (Kusumastuti *et al.*, 2023). Oleh karena itu, dibutuhkan strategi lokal yang adaptif dan kolaboratif guna mempercepat aktivasi IKD, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses teknologi.

Kabupaten Sanggau sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki tantangan tersendiri dalam peningkatan realisasi aktivasi penggunaan Identitas Kependudukan Digital. Kondisi geografis yang luas dan terdiri dari wilayah pedesaan dengan akses infrastruktur yang terbatas menjadi salah satu kendala utama. Berdasarkan data dari PDAK-Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (2024), jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el yaitu 332.100 jiwa. Dari penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el, penduduk di Kabupaten Sanggau yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital mencapai sekitar 2,04% atau hanya 6.783 jiwa dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Dari jumlah total aktivasi IKD 6.783 terdapat 6.629 akun yang sudah aktif dan 154 akun yang belum aktif. Tentunya pencapaian ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu 30% dari penduduk Kabupaten Sanggau yang memiliki KTP atau 99.630 jiwa. Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat

dari hasil presentasi pengaktifasian IKD pada seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau termasuk urutan ke 7 dari 14 kabupaten/kota lainnya. Tentunya dengan data tersebut menandakan masih terdapat permasalahan yang menghambat pencapaiannya target pengaktifasian IKD di Kabupaten Sanggau.

Kabupaten Sanggau menghadapi berbagai tantangan dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi, keterbatasan akses internet, serta status daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain yang rawan administrasi kependudukan. Hal ini menyebabkan capaian aktivasi IKD masih jauh dari target nasional sebesar 30% pada tahun 2024.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau telah melakukan sosialisasi ke perangkat daerah dan jemput bola ke instansi serta masyarakat umum guna memperluas jangkauan layanan IKD (Disdukcapil Sanggau, 2023). Upaya serupa di daerah lain, seperti Cirebon dan Sleman, juga menunjukkan pentingnya strategi pelayanan inovatif dan kolaboratif dalam mempercepat aktivasi IKD (Safitri, 2023).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang terus didorong oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses administrasi kependudukan. Berbagai daerah di Indonesia telah menerapkan strategi aktivasi IKD dengan pendekatan yang beragam, seperti pelayanan langsung di kantor dinas, jemput bola ke masyarakat, dan kerja sama dengan instansi lainnya. Beberapa studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Santoso (2024) di Kota Semarang dan Ratnasari (2024) di Kabupaten Boyolali, menunjukkan bahwa strategi pelayanan dan jemput bola cukup efektif dalam meningkatkan angka aktivasi IKD.

Namun, sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada wilayah dengan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang relatif baik. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji strategi dan permasalahan dalam mengaktifasi IKD di wilayah perbatasan dan tertinggal, seperti Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau memiliki tantangan tersendiri, seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta karakteristik geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain, yang menjadikannya daerah rawan administrasi kependudukan. Selain itu, studi yang membahas saran strategi atau pengembangan model pendekatan berbasis konteks lokal, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, masih sangat terbatas. Padahal, untuk mencapai target nasional aktivasi IKD sebesar 30%, diperlukan strategi yang adaptif terhadap kondisi daerah masing-masing.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut, yaitu dengan mengkaji strategi yang telah diterapkan, permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan saran strategi yang tepat dan aplikatif untuk meningkatkan aktivasi IKD di Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kondisi lapangan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Didalam menyusun penelitian ini, peneliti memerlukan informasi dengan melihat

dari penelitian – penelitian sebelumnya, Kajian terhadap penelitian terdahulu memiliki peran yang penting dalam proses penelitian. Penelitian terdahulu dapat memberikan manfaat yaitu membantu peneliti memperoleh perspektif yang lebih komprehensif tentang topik yang akan diteliti dan memperluas cakrawala pengetahuan terkait subjek penelitian. Dalam konteks penelitian berjudul "Strategi Peningkatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat ", penting untuk melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian relevan yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis telah mengidentifikasi dan memilih lima penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan dan bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Widiyarta dan Humaidah (2023) berjudul Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Mendorong Digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan aktivasi IKD sebagai upaya mendukung proses digitalisasi di wilayah tersebut, di bawah koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program IKD telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Namun, terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan perangkat smartphone yang tidak kompatibel, tidak memiliki smartphone, kurangnya antusiasme masyarakat, serta performa perangkat yang masih lambat. Penelitian kedua oleh Permadi dan Rokhman (2023) berjudul Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai prosedur aktivasi dan manfaat penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital sebagai pengganti KTP elektronik. Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2024) di Kabupaten Boyolali meneliti strategi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kepemilikan IKD sebagai bagian dari transformasi digital dokumen kependudukan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan jemput bola dan pelayanan terpadu untuk meningkatkan cakupan IKD secara efektif di tingkat kabupaten. Penelitian keempat studi oleh Sasongko (2023) mengenai implementasi IKD di Kabupaten Bandung membahas tantangan dan upaya dalam penerapan identitas digital di wilayah tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran tentang hambatan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan untuk mempercepat penggunaan IKD oleh masyarakat. Penelitian kelima, Penelitian berjudul Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia Tahun 2023 oleh Alfarizi dan didapatkan hasil yang sudah cukup baik. Menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi (Alfarizi, 2023). Kelima penelitian tersebut memberikan landasan penting dalam memahami berbagai strategi serta kendala yang muncul dalam proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital di berbagai daerah, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut, khususnya terkait konteks Kabupaten Sanggau. Terakhir, berdasarkan penelitian Mutaqin (2024) menunjukkan bahwa meskipun aspek-aspek seperti keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati dinilai cukup baik, namun masih terdapat kendala pada aspek tangible, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dan fasilitas layanan IKD. Selain itu reformasi lembaga penegak

hukum di tingkat lokal harus berfokus pada peningkatan partisipasi warga, transparansi kebijakan, dan akuntabilitas lembaga. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur aktivasi IKD menjadi hambatan signifikan dalam implementasinya. Penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan sosialisasi dan perbaikan fasilitas untuk mendukung keberhasilan digitalisasi layanan administrasi kependudukan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang administrasi kependudukan digital, dengan fokus pada konteks Kabupaten Sanggau yang memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik. Studi ini tidak hanya menambah literatur tentang program Identitas Kependudukan Digital (IKD), tetapi juga mengkaji secara mendalam strategi peningkatan aktivasi IKD yang disesuaikan dengan tantangan dan kondisi lokal di daerah perbatasan.

Kebaruan lain terletak pada pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan analisis terhadap permasalahan teknis, sosial, dan kebijakan dalam pelaksanaan IKD, yang selama ini masih jarang dikaji secara spesifik di wilayah Kalimantan Barat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategi praktis dan aplikatif yang dapat langsung diimplementasikan oleh pemerintah daerah, sehingga hasilnya memiliki nilai manfaat yang signifikan dalam mempercepat transformasi digital pelayanan publik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi baru dan relevan bagi akademisi, praktisi pemerintahan, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengembangkan program aktivasi IKD di daerah-daerah dengan karakteristik serupa, sehingga memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan praktik administrasi kependudukan digital di Indonesia.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi serta permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran strategi yang tepat guna mendukung percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di wilayah tersebut, sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Menurut (Sugiyono, 2023) operasional merupakan tahap penjabaran aspek dan karakteristik penelitian ke dalam bentuk yang terukur secara nyata. Konsep operasionalisasi sendiri merupakan langkah menguraikan berbagai konsep penelitian menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dan terukur. Dalam pelaksanaannya, operasionalisasi konsep dilakukan dengan memecah konsep dalam kerangka pemikiran menjadi beberapa elemen yang dilengkapi dengan indikator-indikator terkait variabel penelitian. Tujuannya adalah memudahkan proses investigasi, terutama saat mengumpulkan data, serta meningkatkan tingkat pemahaman terhadap penelitian tersebut.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut (Simangunsong, 2017) merupakan Penelitian kualitatif memiliki karakter partisipatif dengan desain yang dapat disesuaikan, memungkinkan

peneliti memodifikasi rencana awal untuk mengakomodasi fenomena nyata yang ditemukan di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif menurut (David Williams, 1995) dalam (Moleong, 2016) adalah Pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan data dalam konteks alamiah dengan menggunakan metode yang sesuai dengan situasi, dan dilakukan oleh individu atau peneliti yang secara alamiah tertarik pada topik tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan kualitatif menitikberatkan pada konteks alamiah, metode yang sesuai dengan konteks tersebut, dan melibatkan individu yang secara alami tertarik pada subjek penelitian. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian strategi peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sanggau karena pendekatan ini memungkinkan penggambaran kondisi aktual secara detail, termasuk identifikasi hambatan dan pemahaman masyarakat terhadap IKD. Metode ini juga memungkinkan analisis mendalam terhadap pola penggunaan IKD serta kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital, dengan pengumpulan data yang komprehensif melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk memahami aspek sosial dan teknis dari implementasinya. Observasi memberikan data mendalam dari konteks sosial yang sedang berlangsung. Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap, seperti notulensi rapat, surat tugas, dan laporan kegiatan (Patton 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta masyarakat, yang bertujuan untuk menggali faktor penghambat dan upaya peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi seperti profil geografis Kabupaten Sanggau, data jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el dan yang telah mengaktifkan IKD, serta regulasi daerah yang mendukung program tersebut (Sugiyono, 2023).

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan kombinasi teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang memiliki kompetensi dan pengetahuan mendalam terkait IKD, sementara *snowball sampling* digunakan untuk menambah informan berdasarkan referensi dari informan awal jika data dirasa belum mencukupi. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, staf bidang pendaftaran penduduk, operator pelayanan IKD, serta masyarakat yang sudah dan belum pernah mengurus IKD. Informan kunci dari penelitian ini yaitu operator pelayanan IKD karena mengetahui teknis mekanisme dan tata cara pengaktifan IKD. Pemilihan informan tersebut dilakukan karena dianggap mampu memberikan data dan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat selama 23 hari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

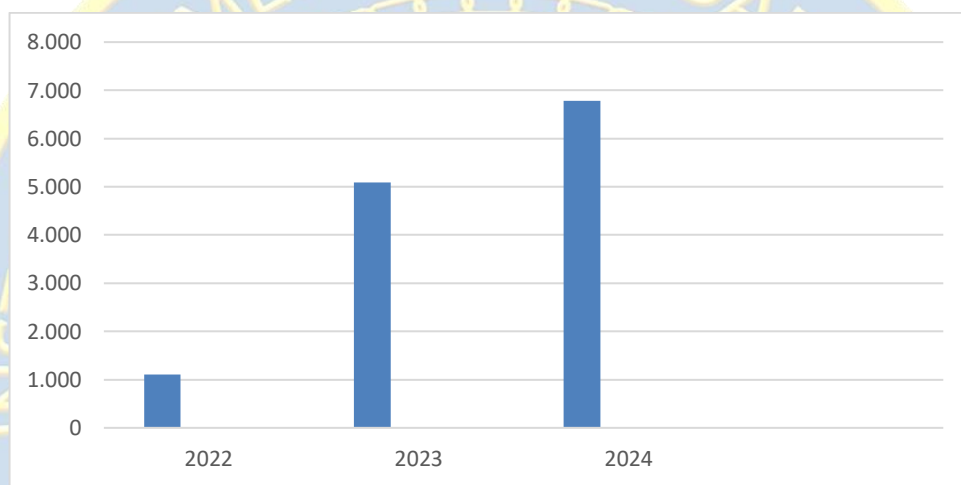
3.1. Peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital di Kabupaten sanggau

3.1.1 Program dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sanggau

Sesuai dengan arahan Dirjen Dukcapil terkait target pelaksanaan aktivasi IKD di seluruh daerah di Indonesia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sanggau juga terus berupaya untuk meningkatkan aktivasi Identitas

Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan hal ini berjalan sesuai dengan Sesuai dengan permendagri no 72 tahun 2022. IKD bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik secara digital, mengurangi ketergantungan pada KTP fisik, serta meningkatkan efisiensi dalam sistem kependudukan.

Gambar 1.
Grafik Jumlah Pengguna IKD di Kabupaten Sanggau 2022-2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sanggau mencatat peningkatan jumlah pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari 1.109 jiwa pada 2022 menjadi 6.783 jiwa pada 2024, namun angka ini masih rendah dibandingkan jumlah penduduk yang telah merekam KTP-el sebanyak 332.100 jiwa, dengan persentase aktivasi hanya sekitar 2,04%. Dari total akun IKD yang terdaftar, 6.629 sudah aktif dan 154 belum aktif, menunjukkan sebagian besar warga yang mendaftar telah menyelesaikan proses aktivasi. Rendahnya tingkat pemanfaatan ini menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat target nasional mewajibkan minimal 30% penduduk di setiap daerah menjadi pengguna IKD. Disdukcapil Kabupaten Sanggau pun merespons dengan menyusun berbagai strategi, meskipun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital, dan akses layanan yang belum merata. Oleh karena itu, Disdukcapil Kabupaten Sanggau telah merancang sejumlah program dan strategi untuk memperluas cakupan aktivasi IKD, antara lain:

1. Program sosialisasi dan edukasi masyarakat

Sosialisasi menjadi langkah utama Disdukcapil Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD), mengingat masih banyak warga yang belum memahami manfaat dan cara aktivasinya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Disdukcapil pada 13 Januari 2025, sosialisasi dilakukan secara

langsung ke kecamatan dan desa dengan melibatkan perangkat desa, serta melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan grup WhatsApp desa untuk menjangkau masyarakat yang lebih akrab dengan teknologi. Selain itu, Disdukcapil juga menjalin kolaborasi dengan instansi seperti perbankan, rumah sakit, dan lembaga pendidikan guna memperluas pemahaman dan penggunaan IKD sebagai bagian dari pelayanan administrasi yang lebih efisien.

2. Program jemput bola untuk aktivitas IKD

Mengingat kondisi geografis Kabupaten Sanggau yang luas dan menantang, Disdukcapil menjalankan program jemput bola untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan, khususnya aktivasi IKD, bagi masyarakat di daerah terpencil. Namun, berdasarkan wawancara dengan operator pelayanan IKD pada 14 Januari 2025, pelaksanaan program ini masih belum maksimal karena keterbatasan tenaga serta sulitnya akses ke beberapa wilayah, terutama yang hanya bisa dijangkau melalui transportasi air, dan belum adanya jadwal kunjungan rutin ke desa-desa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan SWOT guna mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta merumuskan strategi yang tepat dalam peningkatan aktivasi IKD di Kabupaten Sanggau.

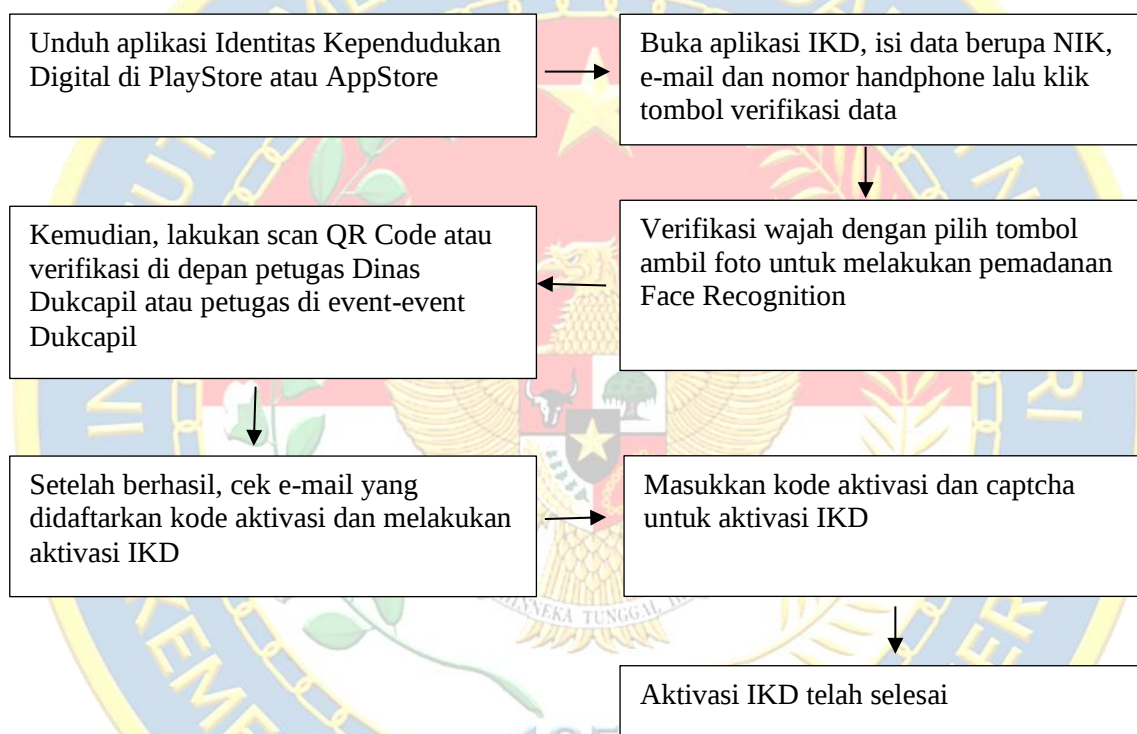
3.1.2 Analisis Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi percepatannya pelayanan pengaktifan Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau yang berasal dari dalam atau internal dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi fokus penelitian. analisis internal bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kekuatan yang dapat dimanfaatkan serta faktor kelemahan yang perlu diantisipasi.

1 Strength

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau memiliki berbagai kekuatan internal dalam mendukung implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), antara lain sumber daya manusia yang kompeten berkat pelatihan rutin dari Ditjen Dukcapil, serta infrastruktur digital yang memadai seperti laptop mobile, jaringan VPN, M2M, dan dukungan Starlink untuk daerah terpencil. Ketersediaan anggaran yang cukup juga memungkinkan pengadaan perangkat, peningkatan jaringan, serta pelaksanaan sosialisasi dan program jemput bola secara efisien. Efisiensi pelayanan juga menjadi kekuatan signifikan, dengan proses aktivasi IKD yang hanya memerlukan waktu 10–15 menit, mencerminkan kesiapan sistem dan kemampuan petugas dalam memberikan layanan cepat, akurat, dan ramah digital kepada masyarakat.

Gambar 2
Tahap Aktivasi IKD



Dengan sistem pelayanan yang cepat, efektif, dan berbasis digital, diharapkan implementasi IKD dapat semakin luas dan memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Hal ini juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan transformasi digital dalam administrasi kependudukan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

2. Weakness

Pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sanggau menghadapi sejumlah kelemahan internal yang berpotensi menghambat efektivitas program, antara lain kendala teknis pada aplikasi IKD yang sering mengalami pembaruan dan gangguan sistem, keterbatasan akses layanan akibat belum tersedianya Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta tantangan geografis yang memperbesar biaya operasional dan memperlambat distribusi layanan. Selain itu, program jemput bola belum berjalan optimal karena tidak adanya jadwal yang

terstruktur serta keterbatasan infrastruktur dan transportasi menuju wilayah terpencil. Kendala-kendala ini menyebabkan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan layanan digital dan terbatasnya jangkauan pelayanan, sehingga dibutuhkan strategi peningkatan infrastruktur, stabilitas sistem, serta perencanaan layanan yang lebih efektif dan merata.

3.1.3 Analisis Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang memengaruhi percepatannya pelayanan pengaktifan Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau yang berasal dari luar atau eksternal dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi fokus penelitian. Analisis eksternal dilakukan untuk mengembangkan peluang yang dapat dimanfaatkan dan mengenali ancaman yang harus dihindari

1. *Opportunities*

Opportunities Dalam pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau memiliki sejumlah peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan strategi pelaksanaan. Peluang tersebut mencakup dukungan kebijakan dari pemerintah pusat yang memberikan landasan hukum kuat, tingginya partisipasi masyarakat di wilayah perkotaan yang sudah terbiasa dengan teknologi, kolaborasi lintas instansi dengan berbagai pihak untuk memperluas akses layanan, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana efektif dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Optimalisasi peluang ini dapat mempercepat proses aktivasi IKD dan memperluas jangkauan layanan secara lebih efisien.

2. *Threats*

Ancaman (*threats*) merupakan kondisi eksternal yang dapat menghambat jalannya program atau operasional organisasi. Dalam konteks pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sanggau, terdapat beberapa ancaman signifikan yang perlu diperhatikan. Pertama, pemadaman listrik menjadi hambatan utama, terutama di daerah terpencil yang tidak memiliki genset atau sumber listrik cadangan. Akibatnya, proses aktivasi yang bergantung pada perangkat elektronik dan internet terhenti, meskipun masyarakat telah berkumpul untuk dilayani. Kedua, munculnya oknum calo yang memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat dengan menawarkan jasa aktivasi berbayar untuk layanan yang seharusnya gratis. Ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merusak kepercayaan publik. Ketiga, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap IKD juga menjadi tantangan, karena sebagian besar warga masih mengandalkan KTP fisik dan merasa kesulitan menggunakan teknologi digital. Terakhir, kendala jaringan internet turut menjadi hambatan serius, khususnya di wilayah pedesaan dengan sinyal yang lemah atau tidak stabil, sehingga mengurangi aksesibilitas dan efektivitas penggunaan aplikasi IKD. Untuk itu, diperlukan strategi mitigasi seperti peningkatan infrastruktur, sosialisasi intensif, dan pengembangan fitur alternatif agar ancaman ini tidak menghambat keberhasilan program.

3.1.4 Skoring Penilaian EFAS dan IFAS

Isu strategis dalam peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sanggau dianalisis menggunakan Matriks SWOT, yang menggabungkan faktor

internal dan eksternal. Sebelumnya, dilakukan penilaian bobot dan rating melalui Matriks IFAS (faktor internal) dan EFAS (faktor eksternal). Bobot ditentukan agar totalnya bernilai 1, sementara rating diperoleh dari kuesioner yang menilai pengaruh tiap faktor terhadap strategi peningkatan IKD. Hasil perkalian bobot dan rating menghasilkan skor masing-masing faktor. Data ini diperoleh dari kuesioner dan diskusi bersama informan, kemudian disusun dalam bentuk Matriks IFAS dan EFAS.

Tabel 1
Skoring Faktor Strategi

Faktor-faktor strategi internal	Tingkat signifikan	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan:				
• Ketersediaan SDM yang Kompeten	4	0,20	4	0,80
• Infrastruktur digital yang memadai	3	0,15	3	0,45
• Anggaran yang cukup untuk operasional	2	0,10	3	0,30
• Waktu pelayanan yang cepat dan efisien	2	0,10	4	0,40
		0,55		1,95
Kelemahan:				
• Sistem yang sering error	3	0,15	2	0,30
• Biaya transportasi jemput bola mahal	2	0,10	3	0,30
• Jarak yang jauh, sulitnya akses	2	0,10	4	0,40
• Program jemput bola belum optimal	2	0,10	3	0,30
	20	0,45		1,3
Total		1,00		3,25
Faktor-faktor strategi eksternal	Tingkat signifikan	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Peluang:				
• Dukungan kebijakan pemerintah pusat	4	0,20	4	0,80
• Partisipasi Masyarakat	3	0,15	3	0,45
• Kolaborasi dengan instansi lain	3	0,15	3	0,35
• Pemanfaatan media sosial	2	0,10	4	0,40
		0,60		2,10
Ancaman:				
• Listrik padam menghambat IKD	2	0,10	2	0,30
• Calo dalam layanan IKD	2	0,10	2	0,20
• Kurangnya pemahaman Masyarakat	2	0,10	3	0,30
• Kendala jaringan	2	0,10	4	0,40
	20	0,45		1,20
Total		1,00		3,25

Dalam menentukan kuadran yang digunakan dalam menentukan strategi yang paling sesuai sebagai saran kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital yaitu dengan menghitung hasil skoring IFAS dan EFAS sebagai berikut :

- **Total Skor IFAS** = **Total Strengths - Total Weaknesses**
= **1.95 - 1.30 = 0.65**
- **Total Skor EFAS** = **Total Opportunities - Total Threats**
= **2.10 - 1.20 = 0.90**

Berdasarkan hasil perhitungan:

- **Total Skor IFAS** = **0.65 (Positif, karena kekuatan lebih besar dari kelemahan)**
- **Total Skor EFAS** = **0.90 (Positif, karena peluang lebih besar dari ancaman)**

Berdasarkan hasil skor IFAS sebesar 0,65 dan EFAS sebesar 0,90, Disdukcapil Kabupaten Sanggau dinilai memiliki lebih banyak kekuatan dibanding kelemahan, serta lebih banyak peluang dibanding ancaman dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Faktor internal yang paling mendukung keberhasilan program ini adalah SDM yang kompeten, infrastruktur digital yang memadai, dukungan anggaran, dan waktu pelayanan yang baik. Meski masih ada kelemahan seperti gangguan sistem, biaya operasional tinggi, dan akses sulit ke daerah terpencil, hal ini masih dapat diatasi dengan perbaikan teknis. Dari sisi eksternal, dukungan kebijakan pemerintah pusat, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dengan berbagai instansi menjadi peluang besar. Ancaman seperti kendala jaringan, listrik padam, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap IKD masih bisa diminimalisir melalui sosialisasi dan peningkatan infrastruktur. Hasil analisis SWOT menempatkan Disdukcapil pada Kuadran I, menunjukkan bahwa strategi yang tepat adalah strategi pertumbuhan (growth strategy) dengan memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang.

3.2 Saran strategi dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat

3.2.1 Matriks analisis SWOT

Pelaksanaan Matriks SWOT adalah alat analisis strategis untuk mengidentifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) dalam suatu organisasi. Matriks ini membagi strategi ke dalam empat kuadran: a) Kuadran I (Strategi S-O): Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang. b) Kuadran II (Strategi S-T) :Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. c) Kuadran III (Strategi W-O):Memanfaatkan peluang sambil meminimalkan kelemahan. d) Kuadran IV (Strategi W-T):Strategi defensif untuk menghindari kelemahan dan ancaman.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau berada pada Kuadran I, sehingga strategi yang digunakan adalah Strategi S-O. Strategi ini menekankan pemanfaatan kekuatan internal untuk meraih peluang eksternal dalam rangka pengembangan dan peningkatan aktivasi IKD. Berikut adalah rumusan strategi S-O yang peneliti ajukan dalam rangka strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau dalam peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sanggau. Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi internal dan eksternal yang diambil melalui wawancara dan observasi secara langsung, dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Mengoptimalkan SDM dan Infrastruktur digital untuk meningkatkan aktivitas IKD

Disdukcapil Kabupaten Sanggau memiliki keunggulan berupa SDM yang kompeten dan infrastruktur digital memadai, termasuk pemanfaatan teknologi

seperti VPN, M2M, dan jaringan Starlink untuk mengatasi kendala jaringan di daerah terpencil. Petugas terlatih mampu memberikan layanan IKD yang efektif, sementara pengembangan platform online mendukung akses informasi dan aktivasi mandiri. Optimalisasi potensi ini diharapkan mempercepat dan memperluas jangkauan aktivasi IKD di wilayah tersebut.

2. Sosialisasi dengan Memanfaatkan Media Sosial dan Kolaborasi dengan Instansi Lain

Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan meningkatnya partisipasi masyarakat menjadi peluang strategis dalam percepatan aktivasi IKD di Kabupaten Sanggau. Disdukcapil dapat memaksimalkan peluang ini melalui pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk menyebarkan informasi, tutorial, serta jadwal layanan jemput bola. Selain itu, kolaborasi dengan instansi seperti perbankan, rumah sakit, sekolah, dan kantor pelayanan publik memperluas penerapan IKD dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi langsung ke desa-desa juga dilakukan guna memberikan edukasi dan bantuan aktivasi secara langsung. Kepala Disdukcapil menyampaikan bahwa strategi ini bertujuan mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan IKD.

3. Mengoptimalkan program jemput bola untuk menjangkau Masyarakat lebih luas

Salah satu kendala utama dalam aktivasi IKD di Kabupaten Sanggau adalah jauhnya jarak dan sulitnya akses ke wilayah terpencil. Untuk mengatasi hal ini, Disdukcapil perlu mengoptimalkan program jemput bola melalui penjadwalan yang lebih sistematis agar masyarakat mengetahui waktu kedatangan layanan di wilayah mereka. Penambahan tenaga teknis juga diperlukan agar pelayanan lebih maksimal dalam setiap kunjungan. Selain itu, pemanfaatan teknologi mobile menjadi solusi agar proses aktivasi tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan infrastruktur. Menurut staf lapangan Disdukcapil, program jemput bola belum optimal karena jadwalnya belum rutin dan jumlah tim masih terbatas. Dengan perbaikan tersebut, layanan aktivasi IKD di daerah terpencil dapat diakses lebih mudah dan merata.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sanggau masih sangat rendah, yakni hanya mencapai 2,04% hingga akhir tahun 2024. Angka ini jauh dari target nasional sebesar 30%. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah terpencil, belum optimalnya strategi jemput bola, serta minimnya kegiatan edukasi dan sosialisasi yang bersifat masif dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wempie et al. (2024) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang menunjukkan capaian aktivasi IKD hanya sebesar 6,8% per Mei 2024. Mereka menyimpulkan bahwa kurangnya literasi masyarakat, terbatasnya tenaga operator, dan minimnya sarana dan prasarana menjadi penyebab utama rendahnya aktivasi. Strategi jemput bola dan penggunaan media sosial belum berjalan optimal karena keterbatasan SDM dan belum meratanya akses internet.

Temuan ini juga mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2024) di Kabupaten Boyolali, yang mencatat capaian aktivasi hanya 3,21%. Meski strategi aktivasi telah dilakukan melalui berbagai kanal layanan seperti loket dinas, kecamatan, mall pelayanan publik, dan jemput bola, hasilnya masih jauh dari harapan. Faktor literasi digital serta belum maksimalnya sinergi antarinstansi menjadi kendala yang identik dengan temuan di Kabupaten Sanggau. Namun demikian, temuan ini berbeda dengan penelitian Sasongko (2023) di Kabupaten Bandung yang menunjukkan kesiapan yang lebih tinggi baik dari sisi SDM, infrastruktur digital, maupun partisipasi masyarakat. Bandung yang secara geografis lebih strategis dan lebih maju dalam akses teknologi informasi menunjukkan bahwa kondisi demografis dan geografis berpengaruh besar terhadap keberhasilan aktivasi IKD.

Lebih lanjut, temuan ini memperkuat simpulan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi, penguatan SDM operator, serta pemanfaatan kanal digital dalam menyebarluaskan informasi dan memperluas jangkauan pelayanan IKD. Peneliti menemukan bahwa kerja sama antara Dinas Dukcapil dengan pihak kecamatan, desa, bank, hingga rumah sakit dapat menjadi strategi efektif dalam mempercepat aktivasi. Sebaliknya, temuan ini menolak pendekatan yang hanya mengandalkan pelayanan di kantor Dinas. Dalam konteks Kabupaten Sanggau, pendekatan tersebut terbukti tidak efektif untuk menjangkau masyarakat secara menyeluruh, terutama yang tinggal di wilayah perdesaan dan blank spot internet. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi aktivasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis konteks wilayah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS, dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Sanggau memiliki potensi internal yang kuat dan dukungan eksternal yang luas untuk meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kekuatan utama seperti SDM yang kompeten, infrastruktur digital yang memadai, serta dukungan anggaran dan waktu pelayanan yang efisien, menjadi modal penting dalam menunjang program ini. Sementara itu, peluang eksternal seperti dukungan kebijakan pemerintah pusat, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta kerja sama lintas sektor dan media sosial sebagai sarana sosialisasi semakin memperkuat posisi Kabupaten Sanggau yang berada pada Kuadran I dalam matriks SWOT. Dengan demikian, strategi agresif (*growth strategy*) menjadi pilihan tepat untuk mempercepat aktivasi IKD, melalui optimalisasi SDM dan infrastruktur, sosialisasi berbasis media sosial dan kolaborasi, serta penguatan program jemput bola untuk menjangkau wilayah terpencil. **Keterbatasan penelitian**, Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, data yang diperoleh lebih banyak bersifat kualitatif dan bergantung pada persepsi informan, sehingga mungkin belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan secara menyeluruh. Kedua, fokus penelitian terbatas pada aspek internal dan eksternal Disdukcapil Kabupaten Sanggau tanpa mengkaji secara mendalam faktor teknis operasional di lapangan seperti kendala jaringan atau kesiapan teknologi secara rinci. Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi secara komprehensif dampak jangka panjang dari strategi yang diusulkan terhadap tingkat aktivasi IKD di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau, khususnya di daerah terpencil dengan akses terbatas. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan kajian yang lebih luas dan mendalam. **Arah masa depan penelitian**, Penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan sistem sosialisasi yang menggabungkan

pendekatan digital dan tatap muka dengan melibatkan tokoh lokal sebagai agen perubahan. Selain itu, perlu dikaji teknologi layanan yang mudah diakses di wilayah dengan jaringan terbatas. Evaluasi lebih lanjut juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan SDM, infrastruktur digital, pemanfaatan media sosial, serta program jemput bola yang lebih efektif. Dengan begitu, penelitian berikutnya diharapkan dapat mendukung percepatan aktivasi IKD secara lebih aplikatif dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, serta para informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing, para pengajar, dan seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan, motivasi, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa, saya menghargai segala bentuk dukungan dari keluarga, rekan mahasiswa, serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat dan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. 2023. Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 41-54. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.41-54>
- Astuti, W. (2022). Efektivitas implementasi migrasi kartu tanda penduduk elektronik ke digital. *Jurnal Khatulistiwa*, 10(1), 55–68. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/4431>
- Azizah, N., Dewi, R. K., & Hoerudin, C. W. (2022). Efektivitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang. *Jurnal Entrepreneur: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1–11. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur/article/view/12061>
- Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. *Government Information Quarterly*, 29(2), 123–132. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.001>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau. (2023). *Kegiatan jemput bola pelayanan IKD pada Kejaksaan Negeri Sanggau*.
- Fitriana, L., & Arif, L. (2024). Implementasi smart governance dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya (Studi kasus: Di Kecamatan Benowo). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 585–596. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/8165>
- Gatiningsih, G., & Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan dan ketenagakerjaan*.
- La Tarifu. (2020). Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan dalam pelayanan kartu tanda penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. *Jurnal Publicuho*, 3(2), 233–246. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12511>
- Mardewi, M., Sofyan, S., & Hendrika, H. (2021). Perancangan sistem informasi

- administrasi kependudukan Distrik Manokwari Barat berbasis desktop. *Jurnal Sains Komputer dan Teknologi Informasi*, 3(2), 12–17. <https://doi.org/10.37639/jti.v11i1.173>
- Mensah, I. K., Zeng, G., & Luo, C. (2020). E-Government Services Adoption: An Extension of the Unified Model of Electronic Government Adoption. *SAGE Open*, 10(2). <https://doi.org/10.1177/2158244020933593>
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Rosdakarya.
- Mutaqin, F., Kurniawan, A., Andoyo, S. T., Khumayah, S., & Wulandari, S. (2024). Population Activation Service Through Digital Civil Identification App. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(1), 40–43. <https://ajosh.org/index.php/jsh/article/view/382>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Prakoso, C. T. (2023). Inovasi layanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perspektif digital government. *Jurnal Paradigma*, 12(2), 45–58. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/5486>
- Prasetyo, H., Pramono, T., & Prissando, F. A. (2022). Kualitas pelayanan publik melalui aplikasi sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (SAKTI) di Kelurahan Semampir. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 6(1), 188–202. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2465>
- Ratnasari, D. T. (2024). *Strategi peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Boyolali* [Skripsi, Universitas Slamet Riyadi].
- Ripa'i, A. (2018). Strategi implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIK). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 35–45. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v2i1.2560>
- Safitri, E. (2023). *Strategi peningkatan cakupan IKD di Kabupaten Sleman* [Skripsi, Universitas Sebelas Maret]. <https://digilib.uns.ac.id>
- Sasongko, R. W. (2023). *Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung* [Tesis, Universitas Padjadjaran].
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Uang, Y., & Bataha, K. (2024). Problematika pelayanan publik berbasis e-government pada daerah kepulauan (Studi kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 17–22. <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6643801/?view=googlescholar>
- Wempie, M. A. R., & Tim Peneliti Disdukcapil. (2024). *Laporan evaluasi pelaksanaan identitas kependudukan digital Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Weisburd, D., Wooditch, A., Weisburd, S., & Yang, S. M. (2017). Reforming municipal law enforcement: Lessons from community-oriented policing evaluation. *Journal of Criminal Justice*, 51, 44–56. <https://doi.org/10.1177/2755323X241233469>

Widiyarta, A., & Humaidah, I. 2023. Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43-51.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>

